

DAFTAR PUSTAKA

- Dina, S. *Kartu Identitas Anak Sebagai Upaya Implementasi Hak Atas Identitas Anak (Studi Di Kota Yogyakarta)*. dspace.uui.ac.id, 2018. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8102>.
- Fauziyah, S. "Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik Dalam Pembuatan Kartu Identitas Anak (Kia) Di Kel. Mekar Jaya Kec. Sukmajaya Kota Depok." *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, n.d. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/55642>.
- Kartika, E. W. *KUALITAS PELAYANAN KARTU IDENTITAS ANAK DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO*. repository.untag-sby.ac.id, 2020. <http://repository.untag-sby.ac.id/5814/>.
- Rismiyati, R., J. Susila, and M. SH. *Efektifitas Pemenuhan Hak Anak Ditinjau Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi Kasus Di Kota Surakarta)*. eprints.ums.ac.id, 2018. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/65356>.
- "Ukuran Efektivitas Efektivitas .1 Pengertian Efektivitas." Accessed April 22, 2022. <https://text-id.123dok.com/document/nq7636moy-ukuran-efektivitas-efektivitas-1-pengertian-efektivitas.html>.
- "BPS Kabupaten Probolinggo." Accessed April 22, 2022. <https://probolinggokab.bps.go.id/indicator/101/188/1/jumlah-rt-rw-dusun-menurut-desa-di-kecamatan-tegal-siwalan.html>.
- "Dasar Hukum Penyusunan RPJM Desa - BERBAGI DESA." Accessed April 22, 2022. <https://www.berbagidesa.com/2020/12/dasar-hukum-penyusunan-rpjm-desa.html>.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Indonesia adalah Negara hukum".

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pengakuan Perlindungan Hukum atas Anak

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

KUHP Perdata 2020 tentang Landasan hukum (yuridis) di atas juga berguna untuk mewujudkan masyarakat Indonesia sadar hukum. Artinya masyarakat sebagai warga negara Indonesia yang baik harus memiliki bukti tertulis yang berisi status

seseorang terhadap peristiwa penting yang terjadi seperti peristiwa perkawinan, kelahiran, kematian, pengakuan, pengesahan anak, dan perceraian

UUD Pasal 28 B dan Pasal 34 tentang Identifikasi Anak dan Bentuk Perlindungan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa